

SIARAN PERS

Contact:

Gandabhaskara Saputra
Communications Coordinator, IESR
(+62) 081310939164 | ganda@iesr.or.id

IESR Response to the Statement of Minister of Energy and Mineral Resources, Ignasius Jonan, Tanggapan IESR terhadap pernyataan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, di ‘Pertemuan tingkat Menteri G20 untuk Transisi Energi dan Lingkungan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan’ di Karuizawa, Tokyo, Jepang

“Secara global, tren harga energi terbarukan terus menurun dan semakin kompetitif terhadap bahan bakar fosil. Pemerintah Indonesia perlu menyusun dan melaksanakan kebijakan dan regulasi yang menciptakan “level of playing field” untuk energi terbarukan sehingga dapat berkembang pesat ”

Jakarta, Selasa, 18 Juni, 2019 – IESR, *think tank* yang memiliki fokus advokasi percepatan transisi energi rendah karbon di Indonesia, dalam kesempatan ini menanggapi respon strategis Indonesia dalam ‘Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara G20 untuk Transisi Energi dan Lingkungan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan’ yang dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, pada Sabtu 15 Juni 2019.

IESR mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia yang ikut mendukung transisi energi dan komitmen untuk mengatasi pemanasan global sebagai respon strategis Indonesia di Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara G20. Di samping itu, transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan pembatasan pembakaran bahan bakar fosil merupakan keniscayaan dalam rangka memenuhi komitmen global untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat, sekaligus implementasi komitmen Indonesia untuk mencapai target yang disepakati dalam Paris Agreement. IESR juga mengapresiasi komitmen pemerintah untuk melaksanakan target SDGs melalui pengembangan energi terbarukan.

IESR hendak menyoroti pernyataan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, yang dikutip sejumlah media, sebagai berikut: *“Pada prinsipnya saya ingin mendorong percepatan energi terbarukan yang affordable yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia sesegera mungkin”*. [Tribunnews.com](http://tribunnews.com)¹. Menurut IESR, pernyataan ini mengesankan bahwa ada dikotomi antara biaya produksi listrik dari energi terbarukan dengan isu keterjangkauan harga energi yang menjadi agenda politik pemerintah saat ini.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menyatakan bahwa arah kebijakan pemerintah yang memprioritaskan batubara sebagai tulang punggung penyediaan listrik yang terjangkau dan pandangan bahwa energi terbarukan mahal sehingga tidak sesuai dengan agenda politik pemerintah, perlu ditinjau kembali. Menurut Fabby, dari analisa IESR, harga listrik dari pembangkit energi terbarukan saat ini sudah semakin terjangkau. Laporan terbaru dari *International Renewable Energy Agency*² atau IRENA menyatakan bahwa, secara global, biaya pembangkitan dari energi terbarukan untuk menghasilkan listrik semakin murah, bahkan biaya tersebut lebih rendah daripada bahan bakar fosil (lihat lampiran).

Kajian IESR memberikan indikasi bahwa biaya pembangkitan listrik dari pembangkitan energi terbarukan skala besar (*utility scale*) dapat bersaing dengan pembangkitan bahan bakar fosil seperti PLTU batubara sepanjang mendapatkan kondisi yang serupa, misalnya dalam hal biaya pendanaan (*financing cost*).

¹<http://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/16/menteri-jonan-ingin-energi-terbarukan-segera-menjangkau-masyarakat>

² <https://www.irena.org/publications/2019/May/Renewable-power-generation-costs-in-2018>

SIARAN PERS

Fabby menyatakan, biaya pembangkitan PLTU bisa lebih murah dari energi terbarukan karena mendapatkan beragam subsidi dari pemerintah; salah satunya adalah subsidi harga batubara dalam bentuk kebijakan pembatasan harga batubara untuk DMO bagi PLN. Selain daripada itu, biaya listrik dari bahan bakar fosil tidak memperhitungkan biaya-biaya eksternalitas dan dampak lingkungan. Perhitungan IESR menunjukkan dengan mencabut subsidi batubara dan menambah pajak emisi karbon sebesar \$25/ton sebagai salah satu biaya eksternalitas, maka biaya pembangkitan listrik dari PLTU batubara akan menjadi lebih mahal dari biaya pembangkitan listrik dari energi terbarukan.

IESR ingin menekankan fakta bahwa isu keterjangkauan seharusnya bukan lagi menjadi kendala pemerintah untuk melakukan percepatan transisi energi ini, melalui pengembangan energi terbarukan yang masif dan agresif. Seperangkat kebijakan dan regulasi diperlukan untuk dapat menurunkan biaya teknologi energi terbarukan di Indonesia sehingga setara dengan biaya teknologi di tingkat global; oleh karena itu, biaya produksi listriknya dapat bersaing dengan teknologi bahan bakar fosil. Menurut IESR, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sejak 2017 tidak efektif mendorong pengembangan energi terbarukan, justru menjadi faktor penghambat dalam bentuk meningkatkan risiko investasi, menurunkan *bankability* proyek pembangkit energi terbarukan, dan menghambat inovasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan energi terbarukan, yang mengakibatkan rendahnya tambahan kapasitas terpasang dalam 5 tahun terakhir (2015-2019).

Pengembangan PLTU batubara yang saat ini direncanakan sebesar 27 GW dan dengan melambatnya penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan pada 2015-2019 akan mempersulit upaya Indonesia memenuhi komitmen penurunan emisi GRK yang ditetapkan melalui ratifikasi Paris Agreement dengan UU No. 16/2016. Analisa IESR menunjukkan jika seluruh PLTU yang direncanakan dibangun, maka total emisi GRK dari PLTU akan naik 2,5X pada 2025-2028 dari tingkat emisi di 2016. Dengan skenario saat ini produksi emisi GRK ini akan berlanjut sampai 2050, sebelum turun bertahap karena berakhirnya masa operasi sejumlah PLTU.

Menurut Erina Mursanti, Program Manager Green Economy IESR, komitmen Indonesia terhadap transisi energi perlu ditunjukkan dengan mulai membatasi pembangunan PLTU batubara setelah 2020 dan meningkatkan bauran energi terbarukan. Analisa IESR menyarankan untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, bauran energi terbarukan harus mencapai 31%-33% pada 2030. Jumlah ini lebih tinggi dari target RUEN saat ini. Menurut Erina, tanpa adanya perubahan arah kebijakan dan percepatan pembangunan energi terbarukan dalam waktu dekat, Indonesia hanya dapat memenuhi setengah (15%-16%) dari kebutuhan tersebut. "Perubahan paradigma dan inovasi kebijakan yang menyeimbangkan keamanan pasokan energi, keberlanjutan lingkungan, dan keekonomian harga energi perlu terjadi; dan perubahan ini dimulai dari Kementerian ESDM", kata Erina.

Erina pun menyesalkan Menteri ESDM dan Menteri KLHK tidak mengoptimalkan kesempatan yang ada saat pertemuan G20 dalam mengakses kerjasama investasi, pendanaan dan teknologi tepat guna dengan negara G20 lain. Dimana kerjasama ini seharusnya dioptimalkan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, dalam hal meningkatkan ambisi Pemerintah Indonesia sebagai upaya pencapaian target Indonesia yang tercantum dalam Paris Agreement.

###

Tentang IESR

Institute for Essential Services Reform adalah institusi riset dan advokasi di bidang energi dan kebijakan lingkungan. Institusi kami mengkombinasikan studi mendalam, menganalisa kebijakan, undang - undang, dan aspek tekno-ekonomi pada sektor energi dan lingkungan dengan aktifitas advokasi kepentingan umum yang kuat untuk

SIARAN PERS

mempengaruhi perubahan kebijakan pada skala Nasional, sub-bangsa dan dunia. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi laman www.iesr.or.id atau ikuti [Facebook](#) dan [Twitter](#) kami.

LAMPIRAN

Tabel 1. Levelized Cost Of Electricity (LCOE) pembangkit ET hasil kajian IESR dan kajian IRENA (dalam cents\$/kWh)

Technology	Indonesia		IRENA (Global Average)	
	Low	High	Low	Average
Solar (Utility Scale)	5,96	10,52	5,7	21,8
Wind (Onshore)	5,29	16,67	4,3	9,9
Hydro (Large)	3,06	53,46	3	13,5
Geothermal	4,49	8,77	5,9	14,2
Bioenergy *	4,34	11,94	4,8	24,3

* Bioenergy in Indonesia is only from biomass

Tabel 2. LCOE PLTU Batubara tanpa/dengan pungutan/pajak karbon (dalam cents\$/kWh)

Coal Plant LCOE	Without CO2 Price		With CO2 Price	
	Low	High	Low	High
Sub critical	4,24	7,30	6,88	9,94
Super critical	4,35	7,37	6,77	9,79
Ultra supercritical	4,46	7,81	6,60	9,95